



KEPALA DESA SALAMNUNGGAL
KECAMATAN CIBEBER KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA SALAMNUNGGAL
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA SALAMNUNGGAL NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SALAMNUNGGAL
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SALAMNUNGGAL

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2104 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah republik Indonesian Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 10. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tehnis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengakatan dan Pemberhentian Perangkat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2015 Nomor 6)
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kewenangan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang

- Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 28. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan Di Desa;
 29. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2022 tentang Panduan Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah Pada Tingkat Desa;
 30. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cianjur

- Tahun 2016-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 10);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 40);
 35. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
 36. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
 37. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
 38. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
 39. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 33);
 40. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 34);
 41. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
 42. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 39);
 43. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 27 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 27);
 44. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 114 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 268);
 45. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 283);
 46. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 05);
 47. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritan Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 06);
 48. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 973/KEP.440-BAPENDA/2022 tentang Besaran dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Kepada Desa Triwulan I dan Triwulan II Tahun Pajak 2022;
 49. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 900/Kep.01/BKAD/2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2023;

50. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978/05/Kep.07-BKAD/2023 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023;
51. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 973/KEP.213-BAPENDA/2023 tentang Besaran dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023;
52. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 973/KEP.344-DPMD/2023 tentang Penggunaan Dana Hasil Pajak Untuk mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Asli Desa Tahun Anggaran 2023;
53. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 973/KEP-BAPENDA/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Cianjur Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2023;
54. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 900/Kep.18/BKAD/2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD) Tahun Anggaran 2023;
55. Keputusan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 900/Kep.9-Barjas/2020 tentang Bentuk-Bentuk Formulir Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Desa;
56. Peraturan Desa Salammunggal Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Salammunggal Tahun 2019 Nomor 2);
57. Peraturan Desa Salammunggal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Salammunggal Tahun 2022 - 2028 (Lembaran Desa Salammunggal Tahun 2022 Nomor 5);
58. Peraturan Desa Salammunggal Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Salammunggal Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Salammunggal Tahun 2023 Nomor 02);
59. Peraturan Desa Salammunggal Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Salammunggal Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Salammunggal Tahun 2023 (Lembaran Desa Salammunggal Tahun 2023 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SALAMNUNGGAL

Dan

KEPALA DESA SALAMNUNGGAL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SALAMNUNGGAL TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Salammunggal Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa
 - a. Semula Rp 2.092.013.800,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp 49.255.583,00

Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.141.269.383,00
2. Belanja Desa		
a. Semula	Rp	2.112.022.282,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	49.083.100,00
Jumlah Belanja Desa setelah perubahan	Rp	2.161.105.382,00
Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	20.008.482,00
3. Pembiayaan		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	20.008.482,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	20.008.482,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	20.008.482,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	20.008.482,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Salamnunggal.

Ditetapkan di : Salamnunggal
Pada tanggal : 13 November 2023



KEPALA DESA SALAMNUNGGAL,

ASIP SOPANDI

Ditandatangani di : Salamnunggal
Pada tanggal : 13 November 2023
SEKRETARIS DESA



ALYAN HADIAN

LEMBARAN DESA SALAMNUNGGAL NOMOR 04 TAHUN 2023

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SALAMNUNGGAL
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.074.013.800,00	2.105.596.900,00	31.583.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.092.013.800,00	2.141.096.900,00	49.083.100,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	453.485.680,00	459.317.680,00	5.832.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	448.657.152,00	448.761.052,00	103.900,00	
5.3.	Belanja Modal	1.029.879.450,00	1.073.026.650,00	43.147.200,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	2.112.022.282,00	2.161.105.382,00	49.083.100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(20.008.482,00)	(20.008.482,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pemblayaan	20.008.482,00	20.008.482,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	20.008.482,00	20.008.482,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	20.008.482,00	20.008.482,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



 Salamnunggal, 13 Nopember 2023
 Kepala Desa Salamnunggal
 ASEB SOPANDI

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SALAMNUNGGAL
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.074.013.800,00	2.105.596.900,00	31.583.100,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.243.185.000,00	1.243.185.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	28.258.800,00	59.841.900,00	31.583.100,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	637.570.000,00	637.570.000,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	
	4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.092.013.800,00	2.141.096.900,00	49.083.100,00	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>734.962.832,00</u>	<u>766.545.932,00</u>	<u>31.583.100,00</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>700.062.012,00</u>	<u>705.997.912,00</u>	<u>5.935.900,00</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	56.568.000,00	56.568.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	56.568.000,00	56.568.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	353.328.160,00	353.328.160,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	353.328.160,00	353.328.160,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.789.520,00	6.178.320,00	388.800,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	5.789.520,00	6.178.320,00	388.800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll,	57.280.782,00	57.384.682,00	103.900,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.210.782,00	41.314.682,00	103.900,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	16.070.000,00	16.070.000,00	0,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, l	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	37.295.550,00	37.295.550,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.295.550,00	37.295.550,00	0,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	0,00	5.443.200,00	5.443.200,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	0,00	5.443.200,00	5.443.200,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	0,00	25.647.200,00	25.647.200,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	0,00	25.647.200,00	25.647.200,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	0,00	25.647.200,00	25.647.200,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	27.100.000,00	27.100.000,00	0,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.5		Sub Bidang Pertanahan	<u>7.800.820,00</u>	<u>7.800.820,00</u>	<u>0,00</u>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.345.000,00	7.345.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.345.000,00	7.345.000,00	0,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	<u>455.820,00</u>	<u>455.820,00</u>	<u>0,00</u>	
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	455.820,00	455.820,00	0,00	
<u>2.</u>		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>881.522.450,00</u>	<u>899.022.000,00</u>	<u>17.499.550,00</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>57.300.000,00</u>	<u>57.300.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (H.	57.300.000,00	57.300.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.300.000,00	57.300.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>39.175.000,00</u>	<u>39.175.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KE	24.175.000,00	24.175.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.175.000,00	24.175.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>724.000.000,00</u>	<u>800.547.000,00</u>	<u>76.547.000,00</u>	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	
2.3.09	5.3.	Belanja Modal	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat (**)	689.000.000,00	748.047.000,00	59.047.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	689.000.000,00	748.047.000,00	59.047.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	<u>35.000.000,00</u>	<u>35.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.875.000,00	27.875.000,00	0,00	
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	7.125.000,00	7.125.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<u>2.000.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.8		Sub Bidang Pariwisata	<u>59.047.450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(59.047.450,00)</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.8.02		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Mil</i>	59.047.450,00	0,00	(59.047.450,00)	
2.8.02	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	59.047.450,00	0,00	(59.047.450,00)	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>51.730.000,00</u>	<u>51.730.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>4.650.000,00</u>	<u>4.650.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.02		<i>Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pem</i>	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>12.000.000,00</u>	<u>12.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.2.99		<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</i>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
3.2.99	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>35.080.000,00</u>	<u>35.080.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.06		<i>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</i>	35.080.000,00	35.080.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	35.080.000,00	35.080.000,00	0,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>263.807.000,00</u>	<u>263.807.450,00</u>	<u>450,00</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>248.637.000,00</u>	<u>248.637.450,00</u>	<u>450,00</u>	
4.2.01		<i>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilin</i>	0,00	147.971.450,00	147.971.450,00	
4.2.01	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	0,00	147.971.450,00	147.971.450,00	
4.2.02		<i>Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)</i>	248.637.000,00	0,00	(248.637.000,00)	
4.2.02	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	248.637.000,00	0,00	(248.637.000,00)	
4.2.06		<i>Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana</i>	0,00	100.666.000,00	100.666.000,00	
4.2.06	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	0,00	100.666.000,00	100.666.000,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>9.920.000,00</u>	<u>9.920.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.3.01		<i>Peningkatan Kapasitas Kepala Desa</i>	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	
4.3.01	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	
4.3.02		<i>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</i>	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	
4.3.02	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	
4.3.99		<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</i>	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<u>5.250.000,00</u>	<u>5.250.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.4.01		<i>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</i>	<i>5.250.000,00</i>	<i>5.250.000,00</i>	<i>0,00</i>	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>180.000.000,00</u>	<u>180.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>180.000.000,00</u>	<u>180.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	<i>180.000.000,00</i>	<i>180.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	2.112.022.282,00	2.161.105.382,00	49.083.100,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(20.008.482,00)	(20.008.482,00)	0,00	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	20.008.482,00	20.008.482,00	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	20.008.482,00	20.008.482,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	20.008.482,00	20.008.482,00	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

